

Transparansi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di PTPN IV Regional III Kabupaten Kampar

Rismawati¹ dan Herman²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
rismawati688@student.uir.ac.id herman@soc.uir.ac.id

Received : March 18, 2024;

Accepted : 30 Juli 2024

Abstract

The purpose of this research is to determine the Transparency of Corporate Social Responsibility at PTPN IV Regional III Kampar Regency, and to determine the inhibiting factors. The research method used is a qualitative descriptive method. The theory used is Transparency theory with specified indicators, namely: Document availability and accessibility, clarity and completeness of information, process openness, regulatory framework that guarantees transparency. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The data analysis technique used is descriptive analysis. The research results show a lack of transparency in the implementation of the Regulations Concerning Corporate Social Responsibility at PTPN IV Regional III Kampar Regency. Factors that hinder the transparency of the PTPN IV Regional III Company Responsibility Regulations are the absence of a role for the TJSP Forum in the transparency of Development programs in Kampar Regency, and a lack of communication between companies and the regional government. There is still a lack of good communication and coordination between the government and companies to synergize government programs with company programs. There is still a lack of socialization of Regional Regulation No. 6 of 2012 concerning corporate social responsibility

Keywords: *Transparency, Corporate Social Responsibility, Forum TJSP*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Transparansi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di PTPN IV Regional III Kabupaten Kampar, dan untuk mengetahui faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan yaitu teori Transparansi dengan indikator yang ditetapkan yakni : Ketersediaan dan aksesibilitas Dokumen, Kejelasan dan kelengkapan informasi, Keterbukaan proses, kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kurang transparansi melaksanakan Peraturan Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di PTPN IV Regional III Kabupaten Kampar. Faktor yang menghambat transparansi Peraturan Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN IV Regional III yakni tidak adanya peran Forum TJSP dalam transparansi program Pembangunan Di Kabupaten Kampar, dan kurangnya komunikasi antara perusahaan dan pemerintah daerah. Masih kurang baiknya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan perusahaan untuk mensinergikan program-program pemerintah dengan program-program perusahaan, Masih kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 Tentang tanggung jawab sosial perusahaan..

Kata kunci : *Transparansi, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Forum TJSP*

Pendahuluan

Administrasi publik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu perusahaan atau organisasi, seperti yang ditunjukkan oleh contoh administrasi publik yang bertanggung jawab untuk membangun, mengembangkan, dan mempertahankan hubungan yang sehat dengan masyarakat. Dalam hal ini, administrasi publik berfungsi sebagai komunikasi, membangun hubungan yang membuat organisasi dan masyarakatnya saling memahami.

Perusahaan dalam era pembangunan saat ini tidak hanya harus menghasilkan keuntungan finansial atau nilai, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan. Proses sinergi ini dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan. Pada dasarnya, setiap orang, kelompok, dan organisasi memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungannya. Ini dikenal sebagai tanggung jawab korporasi sosial.

PT. Perkebunan Nusantara IV Regional III adalah salah satu perusahaan yang menjalankan program TJSP. BUMN ini bekerja di bidang pertanian kelapa sawit dan karet, dengan kantor pusat di Pekanbaru dan cabang di Provinsi Riau. Terdaftar dengan nomor PP. 10 Tahun 1996 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Mendirikan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara IV Regional III.

Berdasarkan penjelasan di atas, beberapa masalah yang disebutkan penulis dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Terindikasi belum optimalnya penerapan prinsip transparansi dalam program bina lingkungan tanggung jawab sosial perusahaan di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional III hal ini dilihat dari segi keterbukaan dalam proses penyelenggaraan program bina lingkungan, seperti dokumen, dana, dan dokumentasi yang dibutuhkan serta mekanisme dan prosedur transparansi yang harus dipenuhi, belum dilaksanakan secara terbuka, yang seharusnya ada di papan laporan realisasi.
2. Terindikasi kurangnya Transparansi, proses pembangunan jalan pada PT. Perkebunan Nusantara IV Regional III dilihat dari laporan kinerja perusahaan masih kurangnya transparansi terhadap anggaran yang dikeluarkan tidak tertera berapa jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi

Administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerja sama secara efektif, efisien, dan rasional untuk mencapai tujuan. (Pasalong, 2020). Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama kelompok manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (Nawawi H. 1990) Selain itu, administrasi juga dapat dilihat dalam arti luas dari 2 atau 3 sudut pandang yang mengarah ke 3 arti menurut sudut pandang masing-masing oleh (Anggara, 2012) yaitu:

- a. Dari perspektif proses, administrasi ini adalah keseluruhan proses berpikir, mulai dari menetapkan tujuan hingga menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapainya.
- b. Administrasi, dari segi fungsi, adalah keseluruhan kegiatan yang secara sadar dilakukan oleh setiap individu atau sekelompok individu yang bertindak sebagai pengurus atau

pengelola. Kegiatan ini dapat mencakup berbagai jenis tugas kerja, seperti perencanaan, organisasi, gerak, dan tindak lanjut, antara lain.

- c. Dari sudut pandang lembaga Administrasi dalam kaitannya dengan orang-orang, baik secara individu maupun kolektif melakukan kegiatan untuk mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Ada beberapa makna yang terkandung dalam administrasi yaitu:

Konsep Organisasi

Organisasi adalah komponen penting dan keberadaannya berpengaruh pada pencapaian suatu tujuan. Organisasi berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk mengelompokkan orang, dan terdiri dari beberapa komponen pembagian tugas serta tempat berlangsungnya pencapaian kegiatan untuk tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Menurut (Kartono D. 2016) Organisasi adalah sekumpulan orang yang tunduk pada aturan bersama untuk bekerja sama dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama dalam batas sumber daya manusia dan materil. Menurut (Zulkifli & Yogya, 2014) Organisasi membantu orang bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi dan juga melakukan berbagai hal seperti membagi tugas, menunjuk staf, memberikan wewenang, dan memberikan tanggung jawab.

Menurut (Siagian S. , 2011) Organisasi adalah setiap bentuk kerja sama antara dua atau lebih orang yang secara formal terikat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam organisasi ini, seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Konsep Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Adapun unsur unsur manajemen yang terdiri dari 6M *man, money, mothode, machines, materials, dan market*. Manajemen adalah suatu cara atau seni mengelola sesuatu untuk dikerjakan oleh orang lain. Manajemen adalah suatu kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan lain.

Manajemen adalah sebuah kegiatan pelaksanaan, disebut manajing dan orang yang melakukan disebut manajer. (Terry G. ,2014). Manajemen adalah proses dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha –usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Handoko H., 2012). Menurut (Kartono K, Pemimpin dan Kepemimpinan, 2016) Manajemen adalah Koordinasi sumber daya manusia dan Pemanfaatan sumber tenaga alam seproduktif mungkin demi kesejahteraan hidup bersama.

Konsep Kebijakan Publik

Menurut Syafiie (2005), "Model kebijakan yang sesuai dengan situasi saat ini adalah model sistem yang memperhatikan desakan-desakan lingkungan antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan, gangguan, rintangan, ujian, kebutuhan, atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi public police, bukan sebaliknya, mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok." Menurut Tangkilisan H.N. (2003), pembuatan kebijakan adalah aktivitas yang direncanakan dengan tujuan, yang membedakannya dari aktivitas fisik. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi jalan alternatif yang diinginkan di masa depan.

Konsep TJSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)

Menurut Handjaja, tanggung jawab sosial perusahaan, atau TJSP, adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar kepada masyarakat melalui tindakan sosial dan lingkungan (Herman 2019). Perusahaan melakukan tindakan yang dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan dalam upaya memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan melalui hasil usahanya. (Herman, 2019).

Menurut (Darwin, 2004), tanggung jawab sosial perusahaan adalah mekanisme yang memungkinkan suatu organisasi atau perusahaan untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholder. Tanggung jawab sosial ini melebihi tanggung jawab hukum perusahaan.

Konsep Transparansi

Menurut Mardiasno (dalam Iznilah et,al 2018) mengatakan bahwa transparansi pemerintah mengacu pada seberapa mudah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk diakses. Fakta keuangan dan fiskal yang relevan dan dapat dipahami adalah cara terbaik untuk mewujudkan keterbukaan ini. Kejujuran, informasi, dan pembenaran dijamin ketika peran dan tanggung jawab jelas, orang-orang dapat diakses secara informal di berbagai tahap proses penganggaran, dan hak publik untuk secara terbuka dan menyeluruh memahami tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya dan kepatuhannya terhadap hukum dan peraturan. Transparansi adalah dasar dari transparansi.

Transparansi adalah pelaksanaan tugas dan operasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum, mulai dari pembuatan kebijakan hingga perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian, semuanya dengan akses mudah bagi orang-orang yang membutuhkan informasi terkait. (Mahmudi, 2011).

Metode

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian deskriptif yaitu untuk memecahkan masalah saat ini. Metode penelitian deskriptif ini mencakup studi kasus, studi komparatif, studi waktu dan gerak, analisis kuantitatif, studi kolaboratif atau operasional, dan menjelaskan, menganalisis, dan menyelidiki melalui survei, wawancara angket, observasi, atau test. Ada kemungkinan bahwa penafsiran data saat ini adalah deskriptif.

Penafsiran ini mencakup contoh situasi, hubungan antara kegiatan, pendapat, sikap, dan pendapat tentang apa yang sedang terjadi atau sedang terjadi. Penafsiran ini juga mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi pekerjaan saat ini, seperti penyimpangan dan anomaly, kecenderungan yang jelas, kontradiksi yang bijak, dll.

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian Tentang Transparansi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di PTPN IV Regional III Kabupaten Kampar

1. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

Berdasarkan wawancara dengan Humas bapak Murdani S.Sos, beliau mengatakan bahwa:

"Terkait realisasi jalan kepada masyarakat diinformasikan secara terbuka, dan kami memberitahukan kepada masyarakat" (wawancara: Rabu, 3 Januari 2024).

Berdasarkan wawancara dengan karyawan PTPN IV Regional III bapak Komarudin S.E mengatakan bahwa:

"terkait realisasi jalan kepada masyarakat diinformasikan secara terbuka, dan kami memberitahukan kepada masyarakat." (wawancara: Rabu, 3 Januari 2024).

Berdasarkan wawancara dengan Camat Perhentian Raja bapak Agus wiyana S.Pd beliau mengatakan:

"Sejauh ini mengenai program bina lingkungan dilakukan secara terbuka dan saya selaku camat perhentian raja memberitahu kepada masyarakat terkait berjalannya program tersebut" (wawancara: Jumat, 5 Januari 2024).

2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

Berdasarkan wawancara dengan Humas bapak Murdani S.Sos, beliau mengatakan bahwa:

"kegiatan realisasi insfrakstruktur jalan di desa hangtuah dilakukan secara difoto adalah sebagai bukti ke atasan(manager) dan masyarakat" (wawancara: Rabu, 3 Januari 2024).

Berdasarkan wawancara dengan karyawan PTPN IV Regional III bapak Komarudin S.E mengatakan bahwa:

"terkait dokumentasi itu adalah hal yang penting untuk bukti ke atasan (manager)." (wawancara: Rabu, 3 Januari 2024).

Berdasarkan wawancara dengan Camat Perhentian Raja bapak Agus wiyana S.Pd beliau mengatakan:

"Sejauh ini mengenai Dokumentasi itu dilakukan dengan baik oleh perusahaan dan menjadi bukti terealisasinya suatu kegiatan " (Wawancara:Jumat,5 Januari 2024).

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa Transparansi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di PTPN IV Regional III Kabupaten Kampar. Berdasarkan Indikator Kejelasan dan Kelengkapan Informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan PTPN IV Regional III kepada masyarakat kabupaten kampar, dalam bentuk dokumentasi secara foto.

3. Keterbukaan Proses

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Masyarakat dengan bapak Roni Hasibuan adalah:

"Keterbukaan Proses tentang pada papan baliho itu tidak ada akan tetapi kami mendapatkan informasi yang diberikan penjelasan langsung oleh perusahaan" (Wawancara: Selasa, 9 Januari 2024).

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Masyarakat dengan bapak Firmansyah adalah:

“Keterbukaan Proses tentang pada papan baliho itu tidak ada akan tetapi kami mendapatkan informasi yang diberikan penjelasan langsung oleh perusahaan” (Wawancara: Selasa, 9 Januari 2024).

Berdasarkan wawancara dengan Humas bapak Murdani S.Sos, beliau mengatakan bahwa:

“masyarakat ikut turun dalam kegiatan ini, dan yang terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh PTPN IV Regional III Kabupaten Kampar adalah forum TJSP Kabupaten.Kampar, pak camat, kades, dan masyarakat” (wawancara: Rabu, 3 Januari 2024).

Berdasarkan wawancara dengan karyawan PTPN IV Regional III bapak Komarudin S.E mengatakan bahwa:

“masyarakat ikut turun dalam kegiatan ini, dan yang terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh PTPN IV Regional III Kabupaten Kampar adalah Forum TJSP Kabupaten.Kampar, Humas,Karyawan TJSP PTPN IV Regional III , pak camat, kades, dan masyarakat.” (wawancara: Rabu, 3 Januari 2024).

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa bahwa. Indikator Keterbukaan Proses dari Progam CSR PTPN IV Regional III adalah adanya baliho-baliho diwilayah lingkungan yang mendapatkan bantuan program bina lingkungan, mempunyai prosedur dalam pelaksanaan progam tersebut dan wilayah tertentu yang mendapatkannya, untuk itu perusahaan harus mengerti dengan dampak yang diberikan kepada masyarakat kabupaten kampar.

4. Kerangka Regulasi Yang Menjamin Tranparansi

Berdasarkan wawancara dengan karyawan PTPN IV Regional III bapak Komarudin S.E mengatakan bahwa:

“kerangka regulasi selalu disertakan dan tentunya mengetahui regulasi, karena setiap melakukan kegiatan itu ada akan regulasinya.” (Wawancara: Rabu, 3 Januari 2024).

Berdasarkan wawancara dengan Camat Perhentian Raja bapak Agus wiyana S.Pd beliau mengatakan:

“untuk regulasi sejauh ini pihak perusahaan selalu melihat atau memperhatikan terkait regulasi yang berlaku di peraturan daerah kabupaten.kampar” (Wawancara:Jumat,5 Januari 2024).

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa Hangtuh dengan bapak Ajin Purwanto adalah:

“untuk regulasi sejauh ini pihak perusahaan selalu melihat atau memperhatikan terkait regulasi yang berlaku di peraturan daerah kabupaten kampar” (Wawancara:Jumat,5 Januari 2024).

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Forum TJSP Kabupaten.Kampar dengan bapak Antoni adalah:

“untuk regulasi memang ada,cuman saya tidak tau perusahaan terpaku pada regulasi yang berlaku atau tidak” (Wawancara:Senin, 8 Januari 2024).

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa . Berdasarkan Indikator Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi Progam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan regulasi tidak menjadi acuan dalam melaksanakan program TJSP, karena tidak mudah atau tidak sembarangan orang untuk masuk ke kantor.

B. Hambatan Transparansi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di PTPN IV Regional III Kabupaten Kampar

1. Masih Kurang adanya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, Forum TJSP, Perusahaanaan dan Masyarakat, dalam Transparansi TJSP PTPN IV Regional III komunikasi yang dilakukan dalam menjalankan progam perbaikan jalan sudah terealisasiakan akan tetapi tidak sesuai target terselesaikan, dimna dalam komunikasi yang dilakukan di dalam forum CSR, belum tersampaikan, sehingga masih adanya jalanan berlubang di Desa sampai saat ini.
2. Masih belum berjalan adanya koordinasi dengan masyarakat terhadap Forum CSR Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Desa Kabupaten Kampar, perusahaan dalam melakukan progam perbaikan jalan, tidak mengabaikan yang menjadikan jalanan desa berlubang, sehingga mengganggu masyarakat Desa dalam melakukan aktifitas.
3. Masih kurang baiknya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan perusahaan untuk mensinergikan progam-progam pemerintah dengan progam-progam perusahaan. Pihak pemerintah kurang tegas kepada pihak perusahaan, yang menjadikan perusahaan PTPN IV Regional.
4. Masih kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 Tentang tanggung jawab sosial perusahaan sehingga masih adanya pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat yang tidak tau pasti tentang jenis dan Transparansi tanggung jawab sosial perusahaan, masyarakat dalam pengajuan Proposal Kepihak perusahaan hanya sampai ke Security, belum tentu di sampaikan kepada pihak perusahaan PTPN IV yang mengakibatkan dalam Peraturan di indahkan yang menjadikan masyarakat tidak pernah dapat dalam mengajukan proposal. Pihak dari pemerintah dalam melakukan pengajuan hanya di beri tidak sepenuhnya di beri oleh pihak perusahaan, pihak perusahaan hanya membantu kepada pihak pemerintah Desa.

Kesimpulan

Rismawati dan Herman

Journal of Public Administration Review Vol. 1 No. 1 / 2024

186

- a. Indikator Kesiapan dan Aksesibilitas Dokumen dalam penelitian Transparansi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di PTPN IV Regional III Kabupaten Kampar Yakni Transparansi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dinilai Kurang Transparansi Karena Perusahaan dalam menjalankan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan belum semuanya berjalan, sehingga membuat masyarakat kabupaten kampar terganggu melakukan aktifitas.
- b. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi dalam penelitian Transparansi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di PTPN IV Regional III Kabupaten Kampar Yakni Transparansi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dinilai kurang Transparansi karena dalam pemberian dana tidak transparansi dan pembangunan untuk kabupaten kampar.
- c. Keterbukaan Proses dalam penelitian Yakni pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dinilai kurang Transparansi karena dalam pelaksanaan Program Tanggung Jawab Perusahaan Tidak memperhatikan di kabupaten kampar yang terkena dampak langsung perusahaan.
- d. Kerangka Regulasi Yang Menjamin Transparansi dalam penelitian Transparansi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di PTPN IV Regional III Kabupaten Kampar Yakni Transparansi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dinilai Kurang Transparansi karena Tanggung Jawab perusahaan yang dilakukan perusahaan terlambat dalam pembangunan yang dilakukan.
- e. Faktor Penghambat Masih belum berjalan adanya koordinasi dengan masyarakat terhadap Forum CSR Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Masih kurang baiknya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan perusahaan untuk mensinergikan program-program pemerintah dengan program-program perusahaan, Masih kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 Tentang tanggung jawab sosial perusahaan sehingga masih adanya pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat yang tidak tau pasti tentang jenis dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan Masih belum adanya peraturan Kabupaten tentang tata cara pencairan dan dan pelaksanaan TJSP, Belum adanya peraturan Bupati Kampar yang menindaklanjuti peraturan daerah Provinsi Riau No. 6 Tahun 2012 Tentang TJSP. Untuk mengukur keberhasilan dalam Efektivitas Penyuluhan Pertanian Oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Sentajo Raya pada penelitian ini menggunakan lima indikator yaitu Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan dan Perubahan Nyata. Pada kelima indikator ini secara keseluruhannya pada kategori cukup efektif, dengan responden Tenaga Penyuluh Pertanian memiliki rata-rata presentase berjumlah "62,5%", dan responden anggota kelompok tani memiliki rata-rata presentase berjumlah "40,8%". Hal ini juga didukung dari hasil observasi penulis terhadap penelitian ini, Penyuluhan Pertanian sudah dijalankan dengan baik, tetapi hal ini berjalan tidak efektif, alasan dari jawaban ini dikarenakan kurangnya tenaga penyuluh pertanian yang ada di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Sentajo Raya, dimana hanya memiliki 8 orang tenaga penyuluh pertanian sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 Pasal 1 menyebutkan bahwa penyuluh pertanian sedikit 1 (satu) orang penyuluh dalam 1 (satu) Desa. Kecamatan Sentajo Raya yang terdiri dari 15 Desa Harusnya memiliki 15 orang penyuluh pertanian namun realitanya hanya memiliki 8 orang penyuluh pertanian.

Sehingga menyebabkan penyuluh pertanian memiliki wilayah binaan 2 bahkan lebih Desa yang ada di Kecamatan Sentajo Raya.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

- Kartono, D (2016). PEMIMPIN dAN KEPEMIMPINAN. Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo, (2021) . Otonomi dan Manajemen Keuangan daerah. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi Offiset, CV.
- Nawawi, H. (1990). Administrasi personil. Jakarta: Gunung Agung.
- Pasalong, H. (2020). Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. Press.
- Siagian, S. P. (2011). Filsafat Administrasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Terry, G.R (2014). Prinsip-Prinsip Manajemen .Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Zulkifli, & Yogia, M. A (2014) Fungsi-fungsi Manajemen. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JLAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.

- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.

- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN

PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.

- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163-175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasayarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.

- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.

- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menanggulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.

- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.